

KEMANDIRIAN
EKONOMI
GERBANG KESEJAHTERAAN

P E M I K I R A N



EKONOMI
I N D O N E S I A

INDEF

KEMANDIRIAN
EKONOMI
GERBANG KESEJAHTERAAN

PEMIKIRAN



EKONOMI
INDONESIA

INDEF

**KEMANDIRIAN EKONOMI
GERBANG KESEJAHTERAAN:
PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA**

Copyright©2019, INDEF

Diterbitkan oleh INDEF, 2019
INDEF
Jl. Batu Merah No.45, Pejaten Timur
Jakarta, 12510
e-mail: indef@indef.or.id

Editor: Tim INDEF
Perancang Sampul: Sarwo Edhie

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

xiv+532 hlm; 15 cm x 23 cm
ISBN: 978-602-50636-6-4

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan:
Pemikiran 100 Ekonom Indonesia/editor: indef-Jakarta: INDEF, 2019
532 hlm; 23 cm

Bencana dalam Perspektif Ekonomi

Fajri Muharja



Fajri Muharja, Ph. D adalah dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Fajri baru saja menyelesaikan Studi Doktor Ilmu Ekonomi (S3) di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 2018. Sebelumnya, pernah mengikuti internship tentang pengelolaan kebencanaan pada Global Disaster Resilience Center University of Huddersfield UK pada 2015. Sebelumnya, Fajri juga telah mengikuti pendidikan di Universitas Andalas pada 2000 dan di Thammasat University Bangkok Thailand Tahun

2009. Bidang ilmu yang ditekuni saat ini adalah berkaitan dengan Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Kebencanaan, dan Ekonomi Kelembagaan.

Sebagai negara yang berada pada cincin api pasifik, Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan bencana. Menurut *The Emergency Event Database (EM-DAT)* menjelaskan bahwa secara global intensitas dan frekuensi bencana alam makin meningkat sampai empat kali lipat dari periode sebelumnya. Dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, dampak kerusakan bencana terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin besar. Mitigasi dan penanganan pasca bencana yang belum optimal menjadi penyebabnya. Hal ini jelas memberikan konsekuensi terhadap negara dan terutama kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana. Dalam menghadapi kecenderungan ini, perlu melakukan penguatan terhadap paradigma penanggulangan bencana dan pembangunan ekonomi.

Setidaknya ada dua pandangan yang menjelaskan hubungan bencana dan pembangunan ekonomi adalah: *Pertama*, dampak ekonomi

dari bencana dalam pembangunan. Pandangan ini menekankan bencana tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, namun berkontribusi terhadap penurunan kesejahteraan.

Pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa bencana alam bukanlah masalah utama dari sisi makroekonomi namun dampaknya dalam jangka panjang bisa berlebihan. Pandangan ini didukung oleh Skidmore dan Toya (2002, 2007). Namun pandangan berbeda muncul dari Noy dan Nuasy (2007), Noy (2009), dan Strobl (2011) yang menjelaskan bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana merupakan permasalahan besar yang harus diselesaikan.

Kedua adalah pembangunan solusi merupakan solusi terhadap risiko bencana itu sendiri. Skidmore dan Toya (2007), Meldelsohn et.al (2012), Bakkensen (2013), Felbermayr dan Grosch (2013) menjelaskan bahwa risiko bencana menurun setidaknya dalam hal ekonomi secara relatif. Kekayaan ekonomi (sumber daya alam dan manusia) dan pembangunan ekonomi setidaknya dapat memecahkan masalah risiko bencana melalui pembangunan berwawasan bencana.

Bencana berkonsekuensi secara ekonomi. Bencana alam adalah peristiwa alam yang memberikan gangguan terhadap fungsi sistem ekonomi yang signifikan berdampak terhadap aset, faktor produksi, output produksi, dan konsumsi. Lebih lanjut, bencana alam bukanlah bahaya alam semata, namun bencana alam merupakan kombinasi antara bahaya alam dan sistem manusia yang terdampak oleh kerusakan, menderita dan terkena gangguan. Bencana bisa terjadi jika ada penggabungan antara peristiwa bahaya dan sistem manusia yang memberikan konsekuensi negatif. Bencana alam dapat juga dipahami sebagai masalah sosial dan kemanusiaan (World Bank, 2010).

Dampak bencana bisa dikategorikan menjadi dampak langsung dan dampak tidak langsung (Pelling et al, 2002); (Lindell and Prater, 2003); (Cochrane, 2004); (Rose, 2004). Kerugian langsung (*direct losses*) adalah konsekuensi langsung dari fenomena fisik bencana seperti konsekuensi secara fisik dari kejadian badai, banjir, gempa bumi yang mengakibatkan jalan hancur, jembatan rusak, atap rumah roboh, kendaraan hanyut, kematian manusia dan sebagainya.

Kerugian tidak langsung (*indirect losses*) adalah kerugian yang tidak hanya terprovokasi oleh bencana itu sendiri dalam rentang waktu yang relatif lama dari kejadian bencana yang mencakup skala spasial dan

sektor ekonomi yang berbeda (Rose, 2004). Tidak mengherankan bahwa komunitas bahaya yang berbeda memiliki pendekatan definisi biaya tidak langsung yang berbeda.

Berbicara kerugian akibat bencana, tidak terlepas dari pengukuran dampak bencana. Selain ukuran Produk Domestik Bruto (PDB), banyak ukuran alternatif yang dapat digunakan seperti menghitung sumber daya alam dan modal sosial. Setelah ukuran pengukuran dampak ditetapkan, tantangan berikutnya adalah mendefinisikan skenario dasar (*baseline*). Biaya bencana harus dihitung dengan membandingkan hal sebenarnya dengan dampak bencana dengan dasar kontrafaktual dengan skenario yang terjadi jika tidak ada bencana. Hal ini tidak mudah didefinisikan. Sering terjadi bahwa setelah rekonstruksi dan rehabilitasi menjadikan kondisi tidak kembali pada skenario dasar (*baseline*).

Asuransi Bencana dan Peran Pemerintah Daerah

Dalam rangka memitigasi risiko bencana yang lebih besar, asuransi bencana menjadi instrumen yang bisa diimplementasikan. Aplikasi asuransi bencana akan mendorong perencanaan pembangunan, terutama fisi, mengadopsi perencanaan yang lebih tahan bencana. Contohnya adalah pembangunan bangunan yang tahan hingga bencana 9 skala richter misalnya.

Masyarakat di daerah yang rawan bencana setidaknya memiliki dua pilihan jaminan terhadap penanggulangan aktivitas ekonomi dan bisnis di masa datang. Pilihan pertama adalah masyarakat secara sadar mengasuransikan kegiatan ekonomi dan aktivitas bisnisnya secara sendiri atau penjaminan yang diberikan pihak lain (seperti pemerintah). Pilihan pertama dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya.

Sedangkan asuransi yang diberikan pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok penduduk miskin yang memiliki sumber daya terbatas dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Perencanaan pemulihan bencana perlu melibatkan pengambil keputusan dan *stakeholders* pasca bencana yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelum bencana. Paradine (1995) menambahkan bahwa teknis penanganan risiko ekonomi dan keuangan yang ditimbulkan bencana adalah dengan menanggung sendiri atau mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi

Implementasi asuransi bencana harus diiringi dengan paradigma pengelolaan bencana berupa penanggulangan pra-bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan) dengan kebijakan pasca bencana (tanggap darurat, periode rehabilitasi dan rekonstruksi bencana). Kedua kebijakan ini saling terkait dan menjadi penentu besar kecilnya kerugian yang timbul dari bencana. Lebih lanjut, kejelasan mengenai perkiraan dampak bencana akan menjadi dasar penting asuransi terimplementasi.

Tiga tahapan penting dalam pengelolaan bencana yang terdiri dari pra-bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), tanggap darurat (kebijakan jangka pendek pasca bencana) dan proses pemulihan dan rekonstruksi (kebijakan jangka menengah dan panjang) menggambarkan alokasi penggunaan anggaran pemerintah yang efektivitasnya memiliki perbedaan. Berkenaan dengan kejadian bencana sulit untuk diprediksi, pemerintah cenderung untuk tidak tertarik dalam mengalokasikan anggaran daerah dalam hal mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Pemerintah akan lebih tertarik untuk mengalokasikan sumber daya untuk penanggulangan pasca bencana (tanggap darurat), rehabilitasi dan rekonstruksi karena menganggap lebih memberikan efek yang nyata untuk kepentingan ekonomi. Paradigma ini menyulitkan implementasi mitigasi bencana serta asuransi bencana.

Namun demikian, paradigma penanggulangan bencana yang berorientasi pasca bencana bisa dirubah dengan adanya semangat desentralisasi. Saat ini pemerintah daerah memiliki ruang yang cukup dalam memainkan perannya secara optimal dalam penanggulangan bencana. Masing-masing pemerintah daerah di Indonesia sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki peran yang otonom dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.

Dalam praktiknya, pedoman pengalokasian anggaran daerah dalam pengelolaan pra-bencana dapat berpedoman kepada informasi risiko bencana yang dipublikasi oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak 2011 yang menjelaskan risiko yang harus dihadapi masing-masing daerah. Ukuran besarnya kepedulian pemerintah daerah terhadap penanggulangan pra-bencana dapat dilihat dari besarnya anggaran non rutin yang dialokasikan pemerintah dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah secara keseluruhan.

Jika pemerintah daerah memiliki pengalokasian anggaran pra-bencana tersebut sebanding dengan tingkat risiko bencana di masing-masing daerah, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah bersangkutan memiliki kepedulian terhadap penanggulangan bencana daerah. Kepedulian ini pada akhirnya akan menstimulus asuransi bencana bisa berjalan, baik dari pemerintah sendiri maupun dari pihak non pemerintah.

Membaca Arah Ekonomi Mendatang

Fithra Faisal Hastiadi



Dr. Fithra Faisal Hastiadi mendapatkan gelar sarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Saat ini Fithra mendapatkan amanah sebagai Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat, FEB UI. Fithra juga sebagai peneliti senior Next Policy. Studi master dan doktor di Keio University dan Waseda University, Jepang. Fithra mempublikasikan sejumlah artikel di beberapa jurnal dan buku bereputasi Internasional. Publikasi barunya berjudul "Trade Strategy in East Asia: From Regionalization to Regionalism". Fithra menyumbang kontribusi signifikan terhadap studi ASEAN 2030 ketika menjadi peneliti di Asian Development Bank Institute (ADBI) Tokyo.

Apa yang anda harapkan pada tahun mendatang? Jika bertanya pada ekonom maka jawabannya sederhana. Biasanya kita akan menyebutkan angka, ya sama seperti anda datang ke dukun dan mendapatkan nomor togel. Anehnya, meskipun sering meleset, profesi ekonom dan dukun tetap saja laku. Orang-orang selalu datang dan minta petunjuk jelang akhir tahun. Bedanya, dukun bekerja dengan kemenyan sebagai medium penerawangan, ekonom bekerja dengan data. Meski patut diakui, keduanya sama-sama mistis. Tetapi setidaknya saya mesti meyakinkan anda para pembaca, bahwa meskipun kami para ekonom sering meleset, setidaknya angka yang kami keluarkan memberikan arah yang berguna. *Well*, saya harus memastikan ini agar anda tetap percaya dengan kami para dukun, maaf maksud saya ekonom. Bagaimana cara kerja para ekonom? Kami mengirimkan sinyal sehingga anda senantiasa waspada dan mampu membaca perubahan sekecil apapun, karena bisa saja secara tiba-tiba muncul elemen kejut yang

memaksa pembuat keputusan harus memilih pada sebuah *strategic inflection point*.

Melihat tahun 2018 lalu, sepertinya akan penuh dengan variasi baik positif maupun negatif. Jika melihat arah pertumbuhan ekonomi, sejatinya Indonesia melaju pada jalur yang positif. Menurut proyeksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI tahun 2017, setidaknya kita akan tumbuh 5,05 persen. Suatu pertanda positif mengingat pada 2015 kita hanya bisa tumbuh di bawah 5 persen. Tren positif ini setidaknya bisa kita lihat jelang akhir 2016 dimana perbaikan kinerja ini lebih banyak dipicu oleh membaiknya harga komoditas dunia. Membaiknya perekonomian mitra dagang tradisional seperti China sepertinya turut mengkerok kinerja ekspor kita. Pada gilirannya ini berdampak pada membaiknya *terms of trade* yang ditransmisikan ke arah perkembangan konsumsi domestik. Menariknya, meskipun ada dorongan kuat ke arah peningkatan konsumsi, data *fast mover consumer goods* (fcmg) justru tumbuh lekat tanah (2,7 persen *year to date*, ytd) jauh di bawah rerata tahunan (11 persen). Hal ini seakan menyiratkan adanya permasalahan dalam kualitas permintaan domestik.

Menengok tetangga, sejatinya Indonesia belum bisa dikatakan baik. Coba lihat Vietnam, dan Filipina yang jauh melesat tumbuh hingga 7 persen. Belum lagi Thailand, Malaysia dan India yang juga tumbuh di atas 6 persen. Bahkan kita tertinggal dari Singapura yang tumbuh hingga 5,2 persen. Dengan begitu, berarti Indonesia tumbuh di bawah rata-rata regional. Ada apa sebenarnya?

Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, membaiknya perekonomian Indonesia lebih banyak dipicu oleh dorongan jangka pendek yaitu membaiknya harga komoditas dunia. Untuk bisa melaju, Indonesia tidak bisa tidak, harus membenahi kinerja industrinya yang hingga sekarang masih dibayangi oleh tren deindustrialisasi. Tren inilah yang pada gilirannya menyebabkan Indonesia kehilangan momentum jaringan rantai produksi global dan semakin tertinggal dengan sejawat dekatnya. Menurut penelitian dari Ilmi dan Hastiadi pada 2017, Indonesia bahkan sudah tertinggal dari Filipina dan Vietnam dalam ranking partisipasi jaringan produksi global industri. Ketinggalan dari Thailand dan Malaysia saja sudah membuat dada ini sesak, mulai 2015 Indonesia justru harus tercecer dari persaingan disalip Filipina dan Vietnam.

Melihat ke depan, FEB UI sebenarnya memiliki proyeksi yang cukup optimis. Tahun 2018 kemarin, perekonomian Indonesia tampaknya akan terus membaik dan mencapai 5,1 persen dan pada 2019 sekarang ini bahkan bisa lebih tinggi. Namun syaratnya berat, ekspor Indonesia harus tumbuh minimal 9 persen setahun. Melihat realisasi, tahun ini saja pertumbuhan ekspor hanya ditargetkan tumbuh maksimal 5,6 persen. Apalagi jika melihat tren *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang terus meningkat hingga lebih dari 6 persen jauh di atas level sebelum krisis (periode 1993-1996) yang sebesar 3,8 persen dan salah satu yang terburuk di ASEAN. Hal ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia sangat tidak efisien. Bagaimana membenahi ini? Salah satu hal yang mesti diperhatikan adalah dalam hal kebijakan industrialisasi.

Sebagai kompetitor terdekat, sudah selayaknya Indonesia dapat belajar dari proses industrialisasi di Thailand sehingga bisa mewujudkan dirinya sebagai pusat industri otomotif di ASEAN. Sebetulnya biaya tenaga kerja di Thailand tidak semurah yang ditawarkan Indonesia. Menurut catatan Organisasi Buruh Internasional, rata-rata upah buruh per bulan di Thailand sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, namun dari sisi produktivitas pekerja Thailand jauh lebih unggul.

Menurut Survei Ekonomi OECD (2012) biaya buruh di Indonesia memang mengalami peningkatan lebih cepat di Indonesia dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Secara khusus, hal ini merefleksikan tingginya upah minimum di beberapa provinsi, namun yang jauh lebih signifikan adalah pengaruh kualitas regulasi yang dikombinasikan dengan beberapa program tunjangan serta aturan hukum perlindungan pekerja yang ketat bagi beberapa pegawai

Sebelum menjelma menjadi raksasa otomotif, Thailand memulainya dengan sebuah kampanye positif untuk menjadi “Detroit of Asia”. Demi mewujudkan visi besar tersebut, maka Thailand membangun infrastruktur penunjangnya dari hulu ke hilir. Menarik jika melihat awal dari proses Thailand menuju industrialisasinya, mereka memulainya dengan strategi substitusi impor dengan harapan bisa mengikuti jejak negara-maju seperti Jepang dan Korea yang berhasil dengan strategi serupa. Namun, sebagaimana argumen dari Aswicahyono (2012), terdapat *strategy switching*, dimana kemudian Thailand dengan cepat menggeser paradigma industrialisasinya dengan menjadikan negaranya

sebagai hub produksi di kawasan. Pada gilirannya membuat investor berbondong-bondong untuk memasuki sektor ini sehingga membentuk klaster industri otomotif yang efisien.

Sebagai catatan, Indonesia harus membenahi jalur birokrasi, regulasi ketenagakerjaan, dan kinerja infrastruktur untuk bisa bersaing. Berdasarkan penelitian Hastiadi pada 2011, setidaknya ada tiga faktor utama yang mesti serius dibenahi dalam meningkatkan daya saing Indonesia demi mendorong investasi. Ketiga faktor itu adalah institusi, infrastruktur dan faktor ketenagakerjaan. Celaknya kedua faktor ini seakan berjalan di tempat. Dalam rilis teranyarnya, *Global Competitiveness Report 2015-2016* (GCI) menyebutkan bahwa faktor terbesar yang menghambat daya saing dus investasi asing yang masuk adalah kerangka institusi yang buruk dan infrastruktur fisik yang jauh dari berkembang.

Secara institusi Indonesia dibayangi oleh korupsi dan etika buruk badan usaha pemerintah dalam hal menjalankan bisnis. Berdasarkan kajian dari *Research Intelligence Unit* (RIU) FEB UI, jika Indonesia melakukan usaha serius yang fokus pada perbaikan infrastruktur penunjang industri, produksi bisa meningkat cukup signifikan hingga mencapai 90 persen. Kemajuan yang signifikan dalam mereformasi regulasi berhasil dicapai dalam beberapa tahun terakhir, namun kemajuan tersebut kebanyakan berkonsentrasi pada memudahkan proses memulai sebuah usaha. Sistem pemberian ijin usaha masih sangat rumit, memakan waktu lama dan berbiaya tinggi serta berperan sebagai penghambat masuknya investasi.

Secara rata-rata, menjalankan sebuah bisnis di Indonesia masih lebih sulit jika dibanding dengan negara anggota OECD lain atau anggota APEC, dan beban tersebut semakin berat terasa khususnya oleh perusahaan berskala kecil. Iklim bisnis yang tidak bersahabat pada gilirannya berkontribusi pada semakin enggannya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini juga berimplikasi pada semakin terbatasnya kesempatan kerja yang juga berdampak pada produktivitas pekerja secara keseluruhan

Sebagai fokus jangka panjang, Indonesia sudah selayaknya menuju konsep pertumbuhan yang berorientasikan keterbukaan serta inovasi. Model perencanaan ini juga diharapkan dapat berfokus pada sistem inovasi yang mumpuni dalam rangka membangun merk global Indonesia. Hal ini pada gilirannya dapat memperkaya keunggulan

komparatif Indonesia yang tidak semata-mata berasal dari *hard ware* atau *hard power*.

Menyimak sekali lagi argumentasi di atas, meyakinkan atau tidak meyakinkan pandangan ini sejatinya bisa digunakan sebagai arah kedepan. Dalam The Illiad, sebuah karya sastra kenamaan yang dibuat oleh Homer, menarik untuk melihat bagaimana Cassandra sebenarnya telah memberikan terawangannya mengenai kejatuhan kota Troya namun tidak diacuhkan. Kita tentu tahu akhir cerita dari kota Troya yang hancur lebur akibat tidak memperhatikan sinyal yang diberikan oleh Cassandra. Siapakah para Cassandra tersebut sekarang? Mungkin anda bisa melihat para Ekonom.

Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia “Edisi Kedua” ini diuraikan setidaknya dalam enam subjek penting dan beragam perspektif, sesuai dengan bidang minat dan konsentrasi kajian para ekonom Indonesia. Buku ini juga cerminan kristalisasi pemikiran pada akhir periode Pemerintahan Kabinet Kerja yang masih sangat relevan dalam beberapa masa yang akan datang, berkaitan dengan Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan.

Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur masih senantiasa dibayangi sekian macam risiko fiskal. Sisi lain, reformasi perpajakan masih amat tergantung pada proses politik perpajakan dan sejauh mana interaksi antar institusi pemerintahan dengan rakyat. Untuk itu, sinergi stimulus fiskal dan percepatan infrastruktur mutlak didorong dengan tuntas.

Kedua, inklusi keuangan tengah menghadapi suku bunga yang relatif tinggi, sementara perbankan Indonesia cenderung mengalami kekeringan dana, karena pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) lebih lamban dibandingkan dengan pertumbuhan kredit. Ekosistem kelembagaan keuangan bisa menjadi jalan keluarnya, termasuk di dalamnya sistem Gerbang Pembayaran Nasional hingga pemanfaatan *financial technology*. Namun, agenda pendalaman sektor keuangan menjadi catatan berharga karena strategi liberalisasi keuangan yang dilaksanakan sejak decade 1980an tidak kunjung berhasil.

Ketiga, UMKM, industri dan persaingan usaha dengan berbagai spektrum menghadapi tantangan era disrupsi teknologi dan sebagainya. Fenomena deindustrialisasi yang terjadi terlalu dini memiliki konsekuensi bahwa tingkat efisiensi dan daya saing sektor industri Indonesia masih cukup rendah di kancah internasional. Penting untuk dilihat bahwa penguatan persaingan usaha dan membuka pasar terhadap pelaku baru akan mendorong efisiensi industri dan usaha tetap berjalan baik.

Keempat, pengembangan sumberdaya manusia (SDM) untuk peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi dihadapkan pada teknologi informasi dan digitasi ekonomi yang akan menggantikan sebagian pekerjaan, termasuk *skills of demand* yang terus dinamis. Kuncinya adalah pengembangan vokasi, pembenahan kurikulum, hingga keterlibatan dunia usaha dan sektor publik dalam pengembangan SDM yang terus dijaga. Termasuk memanfaatkan bonus *demography* yang lebih terencana dan sistematis.

Kelima, pembangunan pertanian, perdesaan dan daerah tertinggal masih mengandalkan intervensi negara melalui APBN dan terlalu fokus pada program swasembada pajale (padi-jagung-kedelai). Sisi lain, kebijakan yang membatasi impor pangan terkadang membutuhkan sumberdaya yang berlebihan. Sementara perdesaan dan daerah tertinggal menjadi tumpuan perubahan ke depan, meskipun pendekatan perdesaan tidak bisa lepas dari pembangunan pertanian.

Keenam, lambannya penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tetap terjadi, walaupun kinerja pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen per tahun. Di sisi lain, kebijakan desentralisasi ekonomi atau otonomi daerah yang dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan birokrasi kepada rakyat, ternyata belum mampu meningkatkan pemerataan pendapatan, bahkan sebaliknya. Untuk itu, perlu dilihat kembali peningkatan kualitas dan politik penganggaran negara, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan, yang diiringi integrasi perencanaan, baik pusat dan daerah.

ISBN 978-602-50636-6-4



9 786025 063664